

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dirumuskan dalam penelitian ini secara sistematis merujuk pada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tersebut pertama tentang perilaku administratif dalam pengelolaan sekolah dasar dan kedua tentang nilai-nilai yang terkait dan mendasari perilaku administratif tersebut.

Kesimpulan tentang perilaku administratif dan nilai-nilai yang terkait dan mendasari perilaku tersebut terutama mencakup kreativitas, keterampilan teknis, kerja sama, dan kewenangan.

1. Kreativitas

Dalam pengelolaan sekolah dasar ternyata para pengelola di lingkungan Dinas P dan K dan Kanwil Depdikbud kurang kreatif. Kurangnya kreativitas didasarkan pada kebiasaan dan ketergantungan pada atasan. Kebiasaan mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara rutin dan tidak menciptakan cara kerja yang lebih produktif. Ketergantungan pada atasan mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan selalu menunggu petunjuk dan perintah.

Perilaku kurang kreatif yang didasarkan pada kebiasaan melaksanakan pekerjaan dan ketergantungan pada atasan itu ternyata disebabkan juga oleh lingkungan, persaingan, tantangan, dan tuntutan.

Lingkungan yang terkait dengan sekolah dasar seperti orang tua murid yang tergabung dalam Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) tidak memberikan sumbangan pemikiran dan kritikan kepada para pengelola supaya menciptakan pelayanan yang produktif. Di samping faktor lingkungan itu ternyata antara Dinas P dan K dan Kanwil Depdikbud tidak ada persaingan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Para pengelola sekolah dasar tidak merasa ada tantangan untuk menciptakan cara kerja yang lebih produktif, dan dari pihak atasan tidak ada tuntutan supaya lebih kreatif.

2. Keterampilan teknis

Pengelola sekolah dasar di lingkungan Dinas P dan K dan Kanwil Depdikbud ternyata kurang terampil dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan. Perilaku kurang terampil tersebut didasarkan pada kemampuan. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan merupakan pencerminan dari keterbatasan kemampuan. Keterbatasan pengetahuan dan

keterampilan mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara rutin sehingga tidak meningkatkan keterampilan para pengelola sekolah dasar.

Perilaku kurang terampil yang didasarkan pada kemampuan itu ternyata disebabkan juga oleh sistem pengangkatan personil, organisasi pengelola sekolah dasar, dan lingkungan yang terkait dengan pengelolaan sekolah dasar.

Sistem pengangkatan personil yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Dinas P dan K dan Kanwil Depdikbud ternyata kurang menunjang peningkatan keterampilan. Sistem pengangkatan personil tersebut tidak mempersyaratkan agar personil yang diangkat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugasnya. Para pejabat struktural di lingkungan Dinas P dan K dan Kanwil Depdikbud pada umumnya diangkat dari guru-guru dan kepala sekolah dasar.

Organisasi pengelola sekolah dasar tidak mempersyaratkan pengetahuan dan keterampilan tambahan bagi pejabat di lingkungan masing-masing. Di samping sistem pengangkatan personil dan organisasi pengelola sekolah dasar ternyata lingkungan yang terkait dengan sekolah dasar tidak menuntut peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis terhadap para pengelola. Lingkungan yang

dimaksudkan adalah BP3 tidak memberikan saran supaya para pejabat struktural di lingkungan Dinas P dan K dan Kanwil Depdikbud dipersyaratkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugasnya.

5. Kerjasama

Kurangnya kerjasama antara pengelola sekolah dasar di lingkungan Dinas P dan K dan Kanwil Depdikbud mengakibatkan penyelesaian pekerjaan masih tumpang tindih. Kurangnya kerjasama tersebut didasarkan pada kepedulian. Kecenderungannya kepedulian di antara masing-masing pengelola sekolah dasar mengakibatkan penyusunan perencanaan aspek yang sama disusun secara sektoral oleh masing-masing pengelola sekolah dasar, pelaksanaan koordinasi dan pengawasan kurang efektif dan belum menyeluruh.

4. Kewenangan

Penggunaan wewenang oleh para pengelola sekolah dasar di lingkungan Dinas P dan K dan Kanwil Depdikbud membawa dampak pada koordinasi kurang efektif.

Perilaku ini didasarkan pada tanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan. Tanggung jawab terhadap wewenang dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya mengakibatkan masing

masing pengelola sekolah dasar merasa berwenang menanggapi pekerjaan yang dipercayakan. Sedangkan disiplin merupakan perwujudan dari kepatuhan yang bertanggung jawab.

Penggunaan wewenang yang didasarkan pada tanggung jawab dan disiplin dan kurangnya kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan beserta perangkatnya masing-masing di daerah yang didasarkan pada kecilnya kepedulian disebabkan juga oleh sistem pembagian kerja dalam pengelolaan sekolah dasar.

Sistem pembagian kerja dalam pengelolaan sekolah dasar yang diikuti dengan wewenang masing-masing membawa konsekuensi pada penyusunan perencanaan disusun secara sektoral oleh masing-masing pengelola sekolah dasar, koordinasi dan pengawasan yang kurang efektif dan belum menyeluruh.

B. Saran-saran

Saran-saran dalam penelitian ini mengacu pada temuan penelitian, pembahasan temuan, dan kesimpulan hasil penelitian.

1. Sebaiknya pemangku jabatan administrator pendidikan pada semua jenjang lembaga pendidikan formal diwajibkan memiliki kemampuan yang relevan. Untuk itu setiap calon yang akan dipromosikan menjadi administrator pendidikan perlu diberikan pendidikan khusus yang bersifat formal.
2. Pengangkatan seorang administrator pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebaiknya memenuhi persyaratan berlatar belakang pendidikan yang relevan sesuai jenjangnya masing-masing.
3. Pemerintah daerah khususnya perlu menyelenggarakan pendidikan khusus untuk administrator pendidikan baik yang terintegrasi dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) maupun yang bersifat *inservice training* (pendidikan dalam jabatan) yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
4. Diperlukan kerjasama antara semua instansi yang berwenang dalam membina karir administrator pendidikan pada semua jenjang lembaga pendidikan. Instansi yang dimaksud misalnya Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti FKIP dan STKIP.

5. Perlu penegasan kembali tentang tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak bertumpang tindih dengan tugas-tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan perangkatnya di daerah.
6. Diperlukan peningkatan kemampuan profesional dalam pengelolaan pendidikan, khususnya bagi pengelola sekolah dasar di tingkat kecamatan. Pengelola yang dimaksud adalah para pejabat struktural di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sebagai ujung tombak pengelola pendidikan di daerah.
7. Dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan pemberian hak guru, kepala sekolah, dan penjaga sekolah dasar sebaiknya dilakukan penyederhanaan prosedur atau mekanisme kerja yang ditempuh agar tidak terlalu banyak dan lama.
8. Perlu peninjauan kembali struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengefektifkan koordinasi dan pengawasan. Hal ini mengingat luasnya daerah yang tidak mungkin dijangkau oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat I sampai ke daerah kecamatan.
9. Sebaiknya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan beserta perangkatnya masing-masing di daerah tidak hanya dalam menangani pekerjaan tertentu saja. Koordinasi sebaiknya mencakup semua pekerjaan yang merupakan tanggung jawab bersama.

